

MODUL 1

AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN

**(AKUNTANSI SAAT INI, *TRIPPLE BOTTOM LINE*, TANGGUNG JAWAB
SOSIAL, KEBERLANJUTAN, DAN AKUNTABILITAS)**



Oleh:

Aditya Pandu Wicaksono

Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Semester Genap 2023/2024

MODUL 1

AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN

(AKUNTANSI SAAT INI, *TRIPPLE BOTTOM LINE*, TANGGUNG JAWAB SOSIAL, KEBERLANJUTAN, DAN AKUNTABILITAS)

Pembahasan pada modul ini terbagi dalam empat bagian besar. Bab I menjelaskan tentang definisi akuntansi saat ini yang telah mengalami pergeseran yang menekankan tidak hanya pada pelaporan keuangan tetapi juga pelaporan non keuangan. Bab II menjelaskan tentang konsep dasar *trippel bottom line* yang saat ini menjadi dasar utama untuk mewujudkan perusahaan yang berkelanjutan. Pada bab ini juga mendiskusikan mengenai *sustainable development goals* yang menjadi cita-cita seluruh negara di dunia untuk melindungi bumi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bab III membahas mengenai konsep dasar dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Akhir dari modul ini atau Bab IV membahas mengenai akuntabilitas perusahaan khususnya pada isu-isu terkait sosial dan lingkungan.

DAFTAR ISI

BAB I DEFINISI AKUNTANSI TERKINI.....	4
1.1. Definisi Akuntansi Konvensional	4
1.2. Pergeseran Definisi Akuntansi	5
1.3. Definisi Akuntansi Saat Ini	8
1.4. Diskusi dari Definisi Baru Akuntansi	10
1.5. Chief Sustainability Officer	12
BAB II KONSEP <i>TRIPPLE BOTTOM LINE</i> DAN <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i>	15
2.1. Pendahuluan	15
2.2. Agenda dari Tripple Bottom Line	16
2.2.1. Pilar Ekonomi (<i>Economy Bottom Line</i>)	18
2.2.2. Pilar Lingkungan.....	19
2.2.3. Pilar Sosial	21
2.3. <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	22
BAB III TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN KEBERLANJUTAN	27
3.1. Definisi Tanggung Jawab Sosial	27
3.2. Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>).....	33
3.3. Akuntansi Keberlanjutan (<i>Sustainability Accounting</i>)	35
BAB IV AKUNTABILITAS DAN PEMANGKU KEPENTINGAN	37
4.1. Definisi Akuntabilitas.....	37
4.2. Sebuah Model Akuntabilitas	39
4.3. Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>).....	42
4.4. Keterlibatan dan Manajemen Pemangku Kepentingan	44
REFERENSI	37

BAB I

DEFINISI AKUNTANSI TERKINI

1.1. Definisi Akuntansi Konvensional

Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang erat kaitannya dengan sebuah siklus pencatatan transaksi organisasi yang terkait dengan keuangan. Karenanya, pemahaman secara umum dari masyarakat luas menganggap akuntansi selalu berkaitan dengan uang. Anggapan ini masuk akal karena sejarah munculnya akuntansi didasarkan pada semangat untuk melakukan pencatatan keuangan. Luca Pacioli melalui bukunya berjudul “Summa de Arithmatica, Geometrica Proportioni et Proportionalita” menciptakan sistem pencatatan buku berpasangan (*double entry bookeping*). Metode ini juga sering disebut dengan metode Venesia.

Jika melihat arti dari akuntansi di kamus Cambridge, akuntansi diartikan sebagai kemampuan atau aktivitas pencatatan uang dari seseorang atau organisasi ketika uang itu diterima atau dikeluarkan. Definisi ini memiliki makna bahwa akuntansi adalah semua aktivitas mengenai pencatatan uang mulai dari pemilik itu menerima hingga mengeluarkan uang tersebut. Kamus Merriem-Webster mengartikan akuntansi sebagai berikut.

“Accounting (n) is the system of recording and summarizing business and financial transactions and analyzing, verifying, and reporting the results”.

Pengertian di atas sekali lagi mengindikasikan bahwa akuntansi menekankan pada sebuah sistem pencatatan dan peringkasan transaksi keuangan dan bisnis serta menganalisa, memverifikasi, dan melaporkan hasil tersebut ke masyarakat. Definisi di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu teknik yang hanya dapat digunakan untuk pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan.

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), yang merupakan asosiasi akuntan publik di Amerika, pada tahun 1941 mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan dalam sebuah cara yang signifikan dalam hal keuangan, transaksi, dan kejadian yang setidaknya merupakan bagian dari karakteristik keuangan, serta menginterpretasikan hasilnya. Definisi yang lain dari American Accounting Association (AAA) mendefinisikan akuntansi sebagai sebuah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memunculkan penilaian dan keputusan dari pengguna informasi tersebut. Definisi dari AAA ini dianggap sebagai definisi akuntansi yang lebih modern. Definisi ini fokus kepada delapan (8) aktivitas akuntansi yaitu identifikasi, mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan. Selain definisi di atas, Watts dan Zimmerman (1986) mengeluarkan pendapat bahwa akuntansi dipahami secara luas sebagai pengukuran dan komunikasi mengenai informasi ekonomi yang relevan untuk pengambilan keputusan.

1.2. Pergeseran Definisi Akuntansi

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa definisi akuntansi baik dari berbagai kamus dan asosiasi akuntan menekankan bahwa akuntansi merupakan praktik pencatatan dan pelaporan keuangan. Namun demikian, definisi akuntansi mulai perlahan bergeser dan tidak semata-mata sebagai teknik pencatatan dan pelaporan informasi keuangan namun telah mencakup informasi non-keuangan. Carnegie et al. (2020) dalam pencariannya mengenai definisi akuntansi mengindikasikan bahwa akuntansi adalah pengukuran, pemrosesan, pengkomunikasian informasi keuangan dan non-keuangan tentang entitas ekonomi seperti bisnis dan perusahaan. Lebih lanjut, Deegan (2019) mendefinisikan akuntansi secara lebih luas dan tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa akuntansi berkaitan erat dengan informasi keuangan.

“So what is ‘accounting’? Simply stated, accounting can be defined as the provision of information about aspects of the performance of an entity to a particular group of people with an interest, or stake, in the organisation—we can call these parties stakeholders” (Deegan, 2019).

Definisi akuntansi dari Deegan (2019) menjelaskan bahwa akuntansi adalah pemberian informasi tentang performa dari suatu entitas kepada kelompok tertentu yang memiliki ketertarikan atau kepemilikan dalam organisasi. Pihak-pihak tersebut biasa dikenal dengan pemangku kepentingan. Deegan (2019) sudah tidak lagi menganggap akuntansi hanya berkaitan dengan informasi keuangan saja tetapi informasi-informasi di luar aspek keuangan yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang berada di sekitar perusahaan. Carnegie et al. (2020) menjelaskan bahwa fokus pada penyediaan dan penggunaan informasi keuangan dan non keuangan terkait dengan dua bentuk utama dari akuntansi. Pertama, performa keuangan periodik organisasi, posisi dan arus kas perlu untuk diukur, dikomunikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Kedua, informasi disiapkan untuk penyusunan strategi manajemen, pengendalian organisasi dan pengambilan keputusan. Akuntansi sekarang tidak hanya menyediakan informasi untuk pihak eksternal tetapi juga difokuskan pada penyediaan informasi untuk internal. Karenanya, definisi lain dari akuntansi mungkin kurang menentukan sifat akuntansi dan cenderung menunjuk pada peran akuntansi dalam melaksanakan kewajiban akuntabilitas, tata kelola, dan keberlanjutan.

Definisi akuntansi dari Deegan (2019) yang menekankan penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan dalam entitas perusahaan yang mencakup tidak hanya pemegang saham tetapi juga kelompok pemangku kepentingan lebih luas. Secara umum, definisi akuntansi di atas memposisikan akuntansi sebagai “pekerjaan teknis”. Anggapan ini memang sulit untuk dibantah karena akuntansi pada intinya merupakan sebuah teknik yang ditujukan untuk menyediakan informasi baik untuk pihak internal maupun eksternal. Konsekuensinya, pekerjaan teknis akuntan saat ini tidak hanya terbatas pada pemberian informasi keuangan, tetapi juga informasi non-keuangan. Namun, saat ini tidak ada batasan

mengenai informasi non-keuangan yang harus disajikan oleh seorang akuntan sehingga pekerjaan teknis akuntan akan menjadi lebih kompleks.

Seiring dengan perkembangan keilmuan di akuntansi, akuntansi saat ini tidak hanya sebagai pekerjaan teknik tetapi juga mencakup praktik sosial dan moral. Dalam konteks praktik sosial, akuntan diharapkan untuk menangkap isu-isu sosial yang terjadi dalam organisasi dan pihak-pihak lain yang terdampak dari aktivitas organisasi. Sudut pandang ini, akuntansi diharapkan berkontribusi dalam membentuk akuntabilitas organisasi terhadap pemangku kepentingan dan mempromosikan keberlanjutan sosial (termasuk lingkungan). Pernyataan ini didasarkan pada argumen dari Gray (1996) yang menyatakan bahwa akuntansi harus lebih dari peran tradisionalnya yang menyajikan informasi keuangan kepada pemilik modalnya. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada hanya sekedar memberikan uang kepada pemegang saham.

Argumen dari Gray (1996) di atas mendorong akuntansi untuk melihat secara lebih luas isu-isu di luar transaksi keuangan. Akuntansi kemudian diharapkan untuk berperan aktif dalam isu sosial dan lingkungan khususnya pada dampak negatif dari aktivitas perusahaan. Hal ini menjadi penting karena perusahaan dengan orientasi profit yang kuat berpotensi mengabaikan dampak bisnisnya kepada lingkungan dan masyarakat. Konsekuensinya, masyarakat dan makhluk hidup lainnya harus menanggung akibat negatif dari operasi bisnis. Orientasi seperti ini harus diminimalisir sehingga membutuhkan teknik akuntansi untuk melakukan hal tersebut. Karenanya, akuntansi dan juga akuntan profesional harus melihat dimensi akuntansi secara luas tidak hanya memenuhi permintaan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan isu keuangan dari perusahaan tetapi juga pemangku kepentingan yang memiliki permintaan pada aspek non-keuangan. Ini berarti bahwa akuntansi harus disesuaikan untuk mencakup isu sosial dan lingkungan sehingga peran akuntansi pada aspek sosial akan terlihat nyata dengan menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal akuntansi sebagai praktik moral, akuntansi esensinya tidak dapat dipisahkan dengan moral yang mana moral adalah inti dari akuntansi (Carnegie et al. 2020). Akuntansi mengarahkan untuk berperilaku secara etis dan sesuai dengan keinginan publik pada semua kondisi. Hal ini berarti bahwa akuntansi membangun realitas dari kondisi organisasi. Asumsi umum dari praktik moral dari akuntansi adalah bagaimana akuntansi menyajikan informasi untuk memenuhi kebutuhan dari pemangku kepentingannya. Informasi tersebut kemudian menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, praktik moral dapat dipahami sebagai praktik yang tindakan atau kelambanannya mempengaruhi orang lain, baik saat ini maupun di masa depan. Itu membantu membentuk tatanan moral organisasi dan masyarakat, yang, pada gilirannya, mempengaruhi perilaku individu dan organisasi.

1.3. Definisi Akuntansi Saat Ini

Meskipun akuntansi kini dipahami sebagai fenomena yang lebih luas dan interaktif secara sosial di dunia saat ini, disiplin ilmu ini masih kekurangan definisi yang secara akurat mencerminkan tujuan dan arti dari akuntansi. Akuntansi sangat penting bagi proses tata kelola, penyusunan strategi, pengendalian, dan akuntabilitas tidak hanya di sektor korporasi/profit tetapi mencakup sektor nirlaba dan pemerintah atau sektor publik. Ini mencakup pertimbangan akuntabilitas yang mencakup aspek finansial dan non finansial. Hal ini mencerminkan keterlibatan dan wacana antara banyak pemangku kepentingan. Hal ini menjadikannya sebagai fenomena yang lebih multidimensi daripada definisi tradisional yang telah banyak dikenal (Carnegie et al. 2020).

Berdasarkan pada pentingnya peran akuntansi untuk tidak hanya mencakup aspek finansial tetapi juga non finansial seperti aspek sosial dan lingkungan, definisi akuntansi perlu untuk diperbaharui. Hal ini diperlukan untuk menegaskan bahwa akuntansi bukanlah teknik yang secara khusus untuk mencatat, meringkas, dan

melaporkan aspek finansial. Akuntansi sudah dipandang sebagai teknik yang dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Ini berarti bahwa akuntansi sangat mengedepankan etika, moral dan peran sosial dari sebuah organisasi yang memberikan informasi lebih komprehensif. Oleh karena itu, Carnegie et al. (2020) mengusulkan definisi akuntansi sebagai berikut.

“Accounting is a technical, social and moral practice concerned with the sustainable utilisation of resources and proper accountability to stakeholders to enable the flourishing of organisations, people and nature”.

Definisi di atas dapat diartikan bahwa akuntansi adalah sebuah praktik teknis, sosial, dan moral yang berkaitan dengan penggunaan berkelanjutan dari sumber daya dan akuntabilitas yang tepat kepada pemangku kepentingan untuk mengembangkan organisasi, masyarakat, dan alam. Dari definisi di atas, Carnegie et al. (2020) menekankan adanya penggunaan berkelanjutan dari sumber daya sebagai bagian dari praktik moral, teknis, dan sosial. Maksud dari penggunaan berkelanjutan adalah bagaimana akuntansi menjadi bagian dari penggunaan sumber daya perusahaan yang bertanggung jawab baik sumber daya keuangan maupun sumber daya alam. Akuntansi menjadi teknik untuk mengelola sumber daya tersebut sehingga perusahaan dapat mengukur sumber daya yang digunakan dan dampak dari operasi bisnisnya. Dalam konteks penggunaan sumber daya alam, akuntansi menjadi teknik untuk penggunaan berkelanjutan dari sumber daya alam sehingga pengelolaan penggunaan sumber daya alam, dampak negatif yang dihasilkan, dan program konservasi yang diperlukan.

Carnegie et al. (2020) juga menyebut akuntabilitas yang tepat untuk pemangku kepentingan. Ini merujuk kepada akuntansi sebagai teknik untuk pemberian informasi kepada seluruh pemangku kepentingan dari organisasi. Pada definisi akuntansi lama, informasi yang dihasilkan oleh akuntansi mungkin didominasi oleh informasi-informasi keuangan yang pada umumnya disajikan dalam laporan keuangan. Namun, karena akuntansi memiliki peran untuk mengedepankan etika dan moral, informasi

yang dihasilkan oleh perusahaan tidak boleh lagi hanya menyajikan informasi keuangan saja. Informasi keuangan mungkin hanya digunakan oleh sebagian kelompok pemangku kepentingan saja seperti investor dan pemegang saham. Namun, kelompok pemangku kepentingan lain mungkin memerlukan informasi lain diluar informasi keuangan seperti praktik sosial dan lingkungan. Karenanya, akuntansi diharapkan menangkap isu-isu sosial dan lingkungan sebagai bagian dari praktik sosial yang kemudian dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang lebih luas.

Definisi di atas juga memberikan pernyataan tentang mengembangkan organisasi, masyarakat, dan alam. Ini mengindikasikan bahwa akuntansi digunakan untuk mempromosikan perilaku-perilaku etis terkait dengan pengembangan masyarakat dan konservasi lingkungan. Akuntansi saat ini tidak hanya digunakan untuk mencatat transaksi keuangan hingga menjadi laporan keuangan, tetapi juga mencatat isu-isu sosial lingkungan yang kemudian dilaporkan ke dalam laporan perusahaan baik dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan. Pernyataan ini pada prinsipnya sejalan dengan *triple bottom line* yang dikembangkan oleh Elkington bahwa perusahaan tidak hanya mengejar profit tetapi juga perlu untuk memperhatikan masyarakat dan juga lingkungan. Dari definisi yang diajukan oleh Carnegie et al. (2020), akuntan perlu untuk mengembangkan akuntansi yang tepat untuk persoalan sosial dan lingkungan.

1.4. Diskusi dari Definisi Baru Akuntansi

Diskusi dapat dimulai dengan pertanyaan “apakah definisi tradisional dari akuntansi “merendahkan” profesi akuntan?”. Definisi tradisional dari akuntansi dianggap tidak merepresentasikan profesi akuntan dan memiliki implikasi terhadap tanggungjawab dari profesi itu sendiri. Definisi tradisional juga dipahami sebagai akuntansi “kencan” pada sebuah era ketika ini masih dalam tahap awal profesionalisasi dan tidak

mencerminkan kemajuan yang dicapai dalam bidang keilmuan dan praktik. Akuntansi memiliki kapasitas untuk berkontribusi pada sumber daya yang berharga, tak ternilai, dan tak tergantikan, seperti lingkungan alam, warisan kita, dan kualitas hidup. Meskipun dunia memandang akuntansi memiliki tujuan yang bermanfaat, tujuan tersebut tidak berkembang untuk mengakomodasi perubahan permasalahan masyarakat, termasuk penanganan isu-isu global yang sangat mendesak yang memerlukan inovasi akuntansi dan akuntabilitas, tata kelola, dan keberlanjutan yang luas. Misalnya, semakin banyak komunitas dan generasi muda yang memandang alam, dan semua spesies di dalamnya, sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan dan dipelihara serta dilindungi dengan lebih baik. Akuntansi berpotensi menawarkan satu jalan penting untuk mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap agenda-agenda penting tersebut, serta memungkinkan kemajuan pribadi, organisasi dan sosial.

Pertanyaan selanjutnya adalah “apakah cara pandang akuntansi saat ini mengalami perubahan?”. Akuntansi pada dasarnya sangat dekat dikaitkan dengan bisnis dan sering dideskripsikan sebagai “bahasa bisnis”. Lebih parah lagi, ketika bisnis dianggap sebagai pusat kapitalisme maka profesi akuntansi dapat dianggap sebagai agen dari kapitalisme itu sendiri. Hal ini menjadi tidak sejalan dengan lingkungan alam yang saat ini telah banyak dirusak oleh manusia dan juga isu sosial yang timbul dari pandangan kapitalisme ini. Hal ini tentu menjadi masalah karena ketika perusahaan mengejar profit yang besar maka perusahaan akan menghasilkan masalah lingkungan dan sosial yang lebih besar. Masalah-masalah seperti kebakaran hutan, polusi, krisis air, kepunahan spesies, perubahan iklim, kelayakan kerja, perbudakan modern menjadi isu yang dekat dengan kapitalisme ini.

Dengan misi kemasyarakatan yang lebih luas, akuntansi dapat menjadi lebih penting dan penting dalam dunia yang dipahami jauh lebih canggih dan kompleks dibandingkan sekadar misi untuk melayani bisnis. “Berita” yang dibawa oleh kontribusi akuntansi ini dianggap positif, namun pola pikir perlu diubah. Perubahan

inilah yang ingin didukung oleh definisi yang diusulkan, dan menyerukan diskusi dan perdebatan, dan tidak hanya dari atau oleh akuntan akuntansi dan profesional. Akuntansi dan kebijakan publik perlu mewujudkan perkawinan yang baru, berumur panjang, dan menarik. Tindakan yang sangat disarankan untuk dipertimbangkan ini sudah terlambat. Potensi penuh akuntansi sebagai praktik teknis, sosial dan moral untuk berkontribusi terhadap solusi permasalahan ini belum muncul. Diharapkan seruan kami mengenai keilmuan dan praktik akuntansi dapat berkontribusi, bahkan dengan cara yang sederhana, untuk menggerakkan kemampuan akuntansi dan pengaruh yang melekat untuk menciptakan dunia yang lebih baik yang konsisten dengan perspektif yang lebih seimbang terhadap planet, manusia, dan keuntungan.

1.5. Chief Sustainability Officer

Ketika akuntansi memiliki cakupan yang lebih luas yang ikut terlibat dalam isu sosial dan lingkungan, maka perusahaan perlu untuk beradaptasi dan sesegera mungkin mengimplementasikan “akuntansi baru” ini. Istilah “keberlanjutan” saat ini tidak pernah populer di dunia perusahaan. Tetapi, ketika keberlanjutan menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dan banyaknya tekanan dari pemangku kepentingan yang menekan perusahaan untuk memperhatikan isu-isu keberlanjutan, perusahaan mulai memberikan perhatian pada isu keberlanjutan. Perusahaan mulai mencari orang yang memahami hal ini dan menawarkan satu posisi eksekutif di perusahaan yaitu *chief sustainability officer* (CSO). CSO diharapkan dapat menyukseskan transformasi keberlanjutan perusahaan. Selain itu, CSO diminta untuk menafsirkan perubahan dalam lingkungan keberlanjutan eksternal dan memikirkan konsekuensi strategisnya bagi perusahaan. CSO juga ditugaskan untuk mempengaruhi, mengkomunikasikan, dan mengatasi kompleksitas organisasi agar perusahaan mereka dapat mewujudkan komitmen lingkungan, sosial, dan governansi (LSG).

Mengutip dari Harvard Business Review, CSO memiliki 8 (delapan) tugas utama sebagai berikut.

1. **Memastikan kepatuhan terhadap regulasi** - mengantisipasi tren peraturan dan implikasinya. Membangun kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan keberlanjutan yang berlaku untuk setiap industri, proses, dan jenis bisnis. Menilai manajemen risiko. Menetapkan kebijakan internal.
2. **Pengawasan dan pelaporan LSG** - Kumpulkan data dan metrik mengikuti standar pelaporan. Tolok ukur dengan rekan-rekan industri. Mempersiapkan penyelesaian dan komunikasi laporan LSG perusahaan.
3. **Mengawasi portofolio proyek keberlanjutan** - Bertindak sebagai pusat manajemen proyek: merencanakan, mengoordinasikan, meninjau kemajuan, dan melacak hasil untuk mengoordinasikan berbagai upaya operasional.
4. **Mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan** - Mendorong dialog berkelanjutan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mengembangkan hubungan yang konstruktif dan transparan.
5. **Membangun kemampuan organisasi** - Identifikasi kesenjangan dan terapkan inisiatif pendidikan yang tepat untuk meningkatkan keterampilan dan/atau mencari sesuatu yang kurang. Identifikasi cara-cara inovatif untuk meningkatkan kemampuan baru. Berbagi dan menyebarkan pengetahuan dan praktik terbaik.
6. **Mendorong perubahan budaya** - Membantu menentukan dan mengomunikasikan tujuan untuk mendorong transformasi. Memperjuangkan perubahan budaya di seluruh organisasi juga melalui pendidikan. Promosikan perubahan pola pikir berdasarkan perilaku nyata. Tetapkan rutinitas untuk memperkuat perubahan, demi “menjalankan apa yang dikatakan” yang kredibel dari para pemimpin.

7. **Pencarian dan bereksperimen** - Mendorong keterbukaan terhadap ekosistem inovasi eksternal. Jelajahi teknologi, solusi, dan praktik keberlanjutan yang sedang berkembang. Uji penerapannya dan belajar dari eksperimen. Tingkatkan adopsi di organisasi yang lebih luas.
8. **Menanamkan keberlanjutan ke dalam proses dan pengambilan keputusan** - Merevisi proses-proses utama dan kriteria/metrik/alat terkait untuk pengambilan keputusan. Latih pengambil keputusan untuk mengelola *trade-off* yang kompleks.

BAB II

KONSEP *TRIPLE BOTTOM LINE* DAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

2.1. Pendahuluan

Konsep *Triple Bottom Line* merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh John Elkington dalam bukunya yang berjudul “Canibal with Forks” yang menekankan kepada keberlanjutan. Pada bukunya tersebut, Elkington memulai bukunya dengan mempertanyakan apakah kapitalisme itu memberikan perhatian pada keberlanjutan. Kemudian, Elkington juga mempertanyakan apakah kita dapat bergantung kepada kapitalisme untuk keberlanjutan. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang berfokus kepada kepemilikan dan penggunaan sumber daya secara pribadi. Ini memiliki arti bahwa kapitalisme memberikan kebebasan kepada individu atau organisasi untuk memiliki, mengendalikan, dan memperoleh keuntungan dari aset dan usaha mereka sendiri. Mengutip dari *Fortune* bahwa perusahaan di bumi ini akan bertujuan untuk menghasilkan uang dan memaksimalkan profit yang mana ini tidak berbeda dengan keserakahan. Lebih lanjut, untuk mendapatkan keuntungan, diperlukan peralatan dan teknologi terbaru yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Jika perusahaan tidak serakah seperti ini, maka perusahaan akan tutup dan berada di dalam masalah.

Dari penjelasan di atas, Elkington kemudian beranggapan bahwa mungkin kita tidak bisa bergantung kepada kapitalisme dalam mewujudkan keberlanjutan. Namun, saat ini berkembang tren bahwa perusahaan mulai menyadari bahwa perlu adanya perubahan dan besarnya tantangan yang ada. Tetapi, mereka, perusahaan-perusahaan besar, belum mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi di sekitar mereka. Pada akhirnya, tergantung kita sendiri apa yang kita inginkan dari kapitalisme. Penciptaan

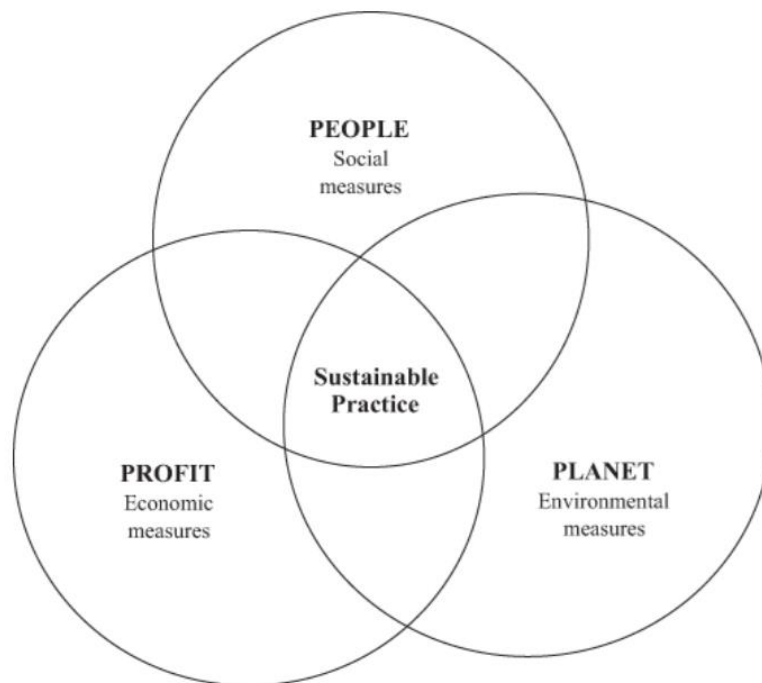
kekayaan merupakan proses yang nyaman dan masyarakat kapitalis di dunia sedang mengalami periode perubahan yang memilukan. Mereka dihadapkan pada masalah-masalah terkait dengan lingkungan atau tekanan pengembangan berkelanjutan seperti yang diartikan secara konvensional. Para pelaku bisnis terkemuka mungkin masih dianggap sebagai pahlawan di zaman modern, namun semakin banyak orang yang bertanya-tanya apakah kita dapat mengandalkan kapitalisme untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan.

2.2. Agenda dari Tripple Bottom Line

Seperti yang dijelaskan di atas, Elkington menekankan adanya perhatian kepada keberlanjutan yang tidak selalu menekankan kepada profit tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan. Lalu, apa yang dimaksud keberlanjutan (*sustainability*)?. Keberlanjutan merupakan prinsip yang memastikan bahwa aktivitas kita tidak hanya terbatas pada ruang lingkup ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan untuk generasi masa depan. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya memikirkan ekonomi atau profit semata, tetapi juga bagaimana perusahaan mampu untuk mengurangi dampak negatif yang dihasilkannya kepada masyarakat dan juga lingkungan. Perusahaan yang menggunakan sumber daya alam sangat mungkin menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan merusak bentang alam, ekosistem, menghasilkan emisi karbon yang tinggi, mengancam flora fauna, dan mencemari sumber air. Selain itu, perusahaan harus memperhatikan aspek sosial yang menekankan pada kesejahteraan orang-orang di dalam perusahaan dan juga masyarakat.

Secara garis besar, konsep *triple bottom line* mengedepankan pada sebuah sinergi antara orientasi profit, sosial, dan lingkungan. Dengan adanya konsep ini, perusahaan dituntut untuk memperhatikan dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan

ditengah-tengah kegiatan usaha untuk menghasilkan profit. Dengan kata lain, *triple bottom line* adalah tentang menyampurkan kepentingan bisnis dengan keinginan dari publik seperti menghasilkan profit dengan menyejahterakan masyarakat dan menjaga kondisi lingkungan. Dari konsep ini, Elkington menyebutkan 3 pilar dari *triple bottom line* yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan. Konsep *triple bottom line* dari Elkington ini biasa disingkat dengan istilah 3P yang merepresentasikan *profit* (ekonomi), *people* (masyarakat), dan *planet* (lingkungan). Adapun keberlanjutan perusahaan berada dalam irisan dari tiga pilar tersebut yang memiliki arti perusahaan harus memperhatikan aspek-aspek tersebut seperti yang disajikan dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Diagram Venn dari *triple bottom line* (Rimmel xxx)

Keberlanjutan pada intinya merupakan wujud dari keselarasan tiga pilar *triple bottom line* tersebut. Hal ini karena tiga pilar tersebut saling terkait dan tidak dapat

dipisahkan. Elkington (1997) menyebutkan bahwa masyarakat tergantung pada ekonomi sedangkan ekonomi tergantung pada planet seperti sumber daya alam, ekosistem, dan lain-lain. Gambar 2.2 mengilustrasikan bahwa perhatian yang seimbang akan mempermudah tercapainya keberlanjutan pada setiap pilar dari *triple bottom line*. Pada sisi yang lain, jika perusahaan tidak mampu menyeimbangkan perhatiannya pada tiga pilar *triple bottom line*, maka perusahaan akan kesulitan mencapai keberlanjutan (lihat Gambar 2.3). Ini akan menempatkan perusahaan di bawah tekanan dari berbagai pihak sehingga tantangan pada keberlanjutan yang dirasakan perusahaan akan semakin besar.



Gambar 2.2. *Triple bottom line* yang stabil



Gambar 2.3. *triple bottom line* tidak stabil

2.2.1. Pilar Ekonomi (*Economy Bottom Line*)

Seperti yang disebutkan di atas bahwa pilar pertama dari *triple bottom line* adalah ekonomi yang merepresentasikan upaya memperoleh profit. Dimensi ini menempatkan fokus pada nilai moneter tetapi mencakup indikator finansial dan non-finansial. Contoh ukuran keuangan adalah penjualan, laba, laba atas investasi, arus kas, dan pajak yang

dibayarkan. Contoh ukuran non-finansial adalah hubungan pemasok, penciptaan lapangan kerja, pendapatan rata-rata, dan pendapatan berdasarkan sektor. Pada pilar ini, perusahaan harus mampu menilai apakah perusahaannya secara ekonomi dapat berlanjut atau *sustainable*. Sebuah langkah penting adalah memahami apa yang dimaksud dengan kapital ekonomi. Sederhananya, modal atau kapital adalah nilai total aset dikurangi kewajiban. Dalam teori ekonomi tradisional, modal sebagai faktor produksi dapat hadir dalam dua bentuk utama: modal fisik (termasuk mesin dan pabrik) dan modal finansial. Namun seiring kita beralih ke ekonomi pengetahuan, konsep ini secara bertahap diperluas hingga mencakup konsep-konsep seperti sumber daya manusia – yang merupakan ukuran pengalaman, keterampilan, dan aset berbasis pengetahuan lainnya dari individu yang membentuk suatu organisasi.

Pilar ini juga menekankan akuntabilitas perusahaan mengenai keuangan. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya. Dalam kasus perseroan terbatas, direktur bertanggung jawab kepada pemegang saham. Namun biasanya, hanya ada sedikit tumpang tindih antara bidang yang dicakup oleh auditor keuangan dalam melayani kepentingan pemegang saham dan isu-isu yang menjadi kepentingan pemangku kepentingan lainnya dalam kaitannya dengan dampak lingkungan dan sosial.

2.2.2. Pilar Lingkungan

Pilar ini mewakili keterkaitan perusahaan dan dampaknya terhadap lingkungan ekologis serta berfokus pada cara perusahaan menggunakan dan memberikan dampak terhadap sumber daya alam di planet ini. Contoh indikator dalam dimensi ini adalah emisi karbondioksida, penggunaan air dan energi, jumlah limbah yang dihasilkan, dampak keanekaragaman hayati, dan penggunaan bahan daur ulang. Elkington menjelaskan tentang kapital natural pada pilar ini. Bagaimana sebuah perusahaan yang ingin menjadi perusahaan yang berkesinambungan dapat mengetahui apakah

perusahaan tersebut ramah lingkungan? Sekali lagi, langkah pertama yang penting adalah memahami apa yang dimaksud dengan kapital natural. Konsep kekayaan alam sangatlah kompleks dan masih terus berkembang. Jika kita mencoba memperhitungkan kapital natural yang terkandung dalam hutan, misalnya, maka yang perlu dilakukan bukanlah sekedar menghitung jumlah pohon dan mencoba memberi label harga pada kayu yang diwakilinya. Anda harus memperhitungkan kekayaan alam yang mendukung ekosistem hutan, menghasilkan kayu dan produk komersial lainnya. Fungsi hutan yang lebih luas perlu dimasukkan ke dalam perhitungan mencakup kontribusi terhadap pengaturan air (di atmosfer, permukaan air, tanah dan air permukaan) dan gas rumah kaca seperti karbondioksida dan metana. Dan kemudian ada flora dan fauna, termasuk perikanan komersial, yang kesehatannya terkait dengan kesehatan hutan.

Kapital natural juga dapat dilihat dalam dua bentuk utama: kapital natural kritis dan kapital natural yang terbarukan, dapat digantikan atau disubstitusi. Bentuk pertama mencakup kapital natural yang penting bagi pemeliharaan kehidupan dan integritas ekosistem; bentuk kedua dari kapital natural yang dapat diperbarui (misalnya melalui pembiakan atau relokasi ekosistem sensitif), diperbaiki (misalnya remediasi lingkungan atau reklamasi gurun), atau disubstitusi atau diganti (misalnya meningkatnya penggunaan bahan pengganti buatan manusia, seperti panel surya di tempat bahan bakar fosil terbatas).

Pilar ini juga mendorong akuntabilitas perusahaan terhadap lingkungan yang mengharapkan regulator untuk mewajibkan perusahaan memperhatikan aspek lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Bisnis dianggap bertanggung jawab oleh aktivis lingkungan hidup dan kampanye media, yang mungkin tidak ada hubungannya dengan target yang diatur atau disepakati secara sukarela. Selain itu, praktik akuntansi terkait lingkungan juga mulai berkembang. Akuntansi lingkungan ini bertujuan untuk: menyeimbangkan kembali perlakuan biaya dan manfaat lingkungan dalam praktik akuntansi konvensional; mengidentifikasi secara terpisah biaya dan pendapatan terkait

lingkungan hidup dalam sistem akuntansi konvensional; merancang bentuk penilaian baru yang mendorong keputusan pengelolaan yang lebih baik dan peningkatan investasi dalam perlindungan dan perbaikan lingkungan; mengembangkan indikator kinerja baru untuk melacak kemajuan; dan bereksperimen dengan cara-cara di mana pertimbangan keberlanjutan dapat dinilai dan dimasukkan ke dalam akuntansi arus utama.

2.2.3. Pilar Sosial

Pilar sosial ini mewakili keterkaitan perusahaan dengan lingkungan sosialnya dan menempatkan fokus pada bagaimana perusahaan menggunakan dan mempengaruhi sumber daya manusia. Perusahaan dapat mendefinisikan berbagai kategori seperti praktik ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Indikator dalam kategori ini antara lain meliputi kegiatan pendidikan, catatan kesehatan dan keselamatan, langkah-langkah keamanan kerja, dampak terhadap masyarakat, mekanisme penghindaran korupsi. Sama seperti pilar ekonomi dan lingkungan, Elkington juga memperkenalkan kapital sosial. Hal ini mencakup sumber daya manusia, dalam bentuk kesehatan masyarakat, keterampilan dan pendidikan. Namun hal ini juga harus mencakup pengukuran yang lebih luas mengenai potensi penciptaan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ismail Serageldin, wakil presiden pembangunan ramah lingkungan di Bank Dunia, sumber daya manusia memerlukan “investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan nutrisi.” Mengembangkan dan menyebarkan keterampilan dan pelatihan yang diperlukan, khususnya di negara-negara berkembang dan negara-negara berkembang, memerlukan bentuk-bentuk baru kemitraan publik-swasta.

Bisnis adalah bagian dari masyarakat dan pemerintah berupaya untuk mengatur dan mengendalikan dampak sosial yang terkait dengan industri dan perdagangan. Namun sejarah penuh dengan contoh di mana agenda tersebut diciptakan di luar dunia

pemerintahan dan bisnis yang saling terkait. Baik itu kampanye untuk mengakhiri perbudakan atau berbagai kampanye untuk mengakhiri pekerja anak di pabrik-pabrik di Eropa dan Amerika Utara, para pelaku bisnis telah lama menyadari bahwa kebebasan bertindak mereka semakin dibatasi oleh munculnya gerakan-gerakan sosial. Ketika globalisasi semakin meningkat, hubungan antara keuntungan ekonomi dan sosial menjadi semakin bermasalah.

Akuntansi sosial kemudian dikembangkan untuk menangkap isu-isu sosial yang dihasilkan dari operasi bisnis. Akuntansi sosial bertujuan untuk menilai dampak suatu organisasi atau perusahaan terhadap orang-orang baik di dalam maupun di luar. Permasalahan yang sering dibahas adalah hubungan masyarakat, keamanan produk, inisiatif pelatihan dan pendidikan, sponsorship, sumbangan amal berupa uang dan waktu, dan lapangan kerja bagi kelompok yang kurang beruntung. Kemudian, audit sosial juga dikembangkan yang biasanya mencakup dampak non-finansial perusahaan. Dalam pengertian ini, audit lingkungan sering dipandang sebagai salah satu bentuk audit sosial. Tujuan audit sosial adalah agar suatu organisasi menilai kinerjanya sehubungan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Suka atau tidak, audit dan pelaporan keberlanjutan akan mengutamakan kinerja *triple bottom line* dan khususnya akuntansi, audit, dan pelaporan sosial dan etika kemungkinan besar akan mencapai puncaknya dengan pesat.

2.3. Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada tahun 2015, seluruh negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui SDGs cetak biru bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet ini, saat ini dan di masa depan. SDGs ini merupakan agenda yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Pada tingkat yang lebih luas, SDGs sendiri merupakan contoh kebijakan yang berasal dari inisiatif kebijakan sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs). MDGs awalnya dikembangkan oleh OCED pada tahun

1996 sebagai bagian dari makalah strategi mereka untuk abad kedua puluh satu. MDGs disepakati oleh para Kepala Negara pada KTT Milenium pada tahun 2000. MDGs merupakan “kerangka kemitraan pembangunan eksplisit pertama di dunia antara negara maju dan berkembang”. MDGs ini memiliki delapan tujuan yang diharapkan tercapai pada tahun 2015 yaitu:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem
2. Mencapai pendidikan dasar universal
3. Mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan
4. Menurunkan angka kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup
8. Mendorong kemitraan global untuk pembangunan

Setelah tahun 2015, yang merupakan target dari MDGs, terlewatkan, PBB kemudian membuat tujuan-tujuan selanjutnya untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, melindungi planet, dan memastikan kesejahteraan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan SDGs. SDGs telah disepakati oleh 193 negara anggota PBB dan berkomitmen untuk mencapai tujuan dari SDGs pada tahun 2030. SDGs memiliki 17 tujuan sebagai berikut.

1. Tanpa kemiskinan
2. Tanpa kelaparan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Air bersih dan sanitasi layak
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

9. Industri, inovasi dan infrastruktur
10. Berkurangnya kesenjangan
11. Kota dan permukiman yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
13. Penanganan perubahan iklim
14. Ekosistem lautan
15. Ekosistem daratan
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Dari semangat SDGs yang telah disusun, Bebbington dan Unnerman (2018) menguraikan implikasi dan peluang pada praktik dan penelitian di ilmu akuntansi. Meskipun SDGs merupakan inisiatif dan kesepakatan antar pemerintah, yang memberikan komitmen kepada pemerintah suatu negara, bukan individu atau dunia usaha, namun proses pengembangan SDGs berbeda dari sebelumnya karena mengedepankan peran sektor swasta. Kerangka kerja SDGs menyadari bahwa tindakan pemerintah saja tidak dapat mencapai target SDG, karena hal ini memerlukan tindakan bersama antar pemerintah, organisasi sektor publik dan swasta, masyarakat sipil, dan individu warga negara. Akibatnya, banyak individu dan organisasi yang terlibat dalam perdebatan dan inisiatif pembangunan berkelanjutan sudah mengetahui proposal dan rincian SDGs jauh sebelum proposal tersebut diadopsi secara resmi. Oleh karena itu, organisasi-organisasi yang berkomitmen untuk memajukan pembangunan berkelanjutan mempunyai waktu sebelum kesepakatan formal dan peluncuran SDGs untuk mempertimbangkan bagaimana kerangka SDGs dapat berdampak pada kebijakan dan praktik keberlanjutan mereka – termasuk bagaimana mereka dapat berkontribusi paling efektif terhadap pencapaian SDGs.

Di bidang pelaporan, beberapa perusahaan dengan cepat memasukkan SDGs ke dalam laporan keberlanjutan mereka. Dampak yang muncul dari SDGs terhadap pelaporan keberlanjutan memperkuat pandangan bahwa SDGs dengan cepat mendapatkan perhatian di kalangan bisnis besar. Meskipun SDGs tampaknya mempercepat, memotivasi dan memfokuskan upaya-upaya terkait keberlanjutan dari banyak bisnis tersebut, SDGs juga dapat digunakan (oleh beberapa organisasi, sampai batas tertentu) untuk menyamarkan keadaan seperti biasa dengan menyamakannya menggunakan retorika keberlanjutan terkait SDG. Investigasi akademis diperlukan untuk membantu memahami di mana inisiatif akuntansi khusus terkait SGD berada pada kontinum antara retorika murni dan tindakan yang bermakna, dan untuk menginformasikan penggunaan SDGs yang paling efektif oleh berbagai organisasi dalam mengembangkan kebijakan dan praktik yang akan berkontribusi terhadap pencapaian SDGs.

Profesi akuntansi juga dengan cepat memahami pentingnya dan potensi SDGs, keterlibatan substansial dunia usaha dengan SDGs, dan peran yang dapat dimainkan oleh profesi akuntansi dalam mengupayakan tindakan yang berarti dalam kerangka SDG. Pada bulan November 2016, Federasi Akuntansi Internasional (IFAC – badan perwakilan global badan akuntansi profesional) menerbitkan dokumen kebijakan yang menjelaskan bagaimana profesi akuntansi dapat membantu realisasi SDGs. Dokumen ini dihasilkan dari lokakarya yang diadakan oleh IFAC yang mengidentifikasi delapan dari 17 SDGs sebagai tujuan yang dapat memberikan dampak terbesar bagi profesi akuntan, dan mengeksplorasi bagaimana profesi akuntan dapat berkontribusi paling besar terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Bebbington dan Unnerman (2018) menawarkan agenda penelitian terkait SDGs. Pertama adalah **teknologi akuntansi dalam analisis SDGs**. Ada peluang bagi akuntan untuk berkolaborasi dengan peneliti yang bekerja pada berbagai skala spasial untuk melihat apakah integrasi antara data yang dihasilkan di (misalnya) wilayah dan dari organisasi dapat dihubungkan sehingga tindakan di tingkat entitas berada dalam

(dan mendukung) regional. -analisis tingkat kinerja terkait SDG. Untuk mencapai kolaborasi yang berarti dalam bidang ini, akademisi akuntansi perlu memperluas cakupan batas-batas organisasi dan teknologi komunikatif yang secara tradisional dianggap sebagai kewenangan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kedua adalah **menemukan kembali topik yang relevan**. SDGs memberikan serangkaian petunjuk kepada komunitas ilmiah sehubungan dengan bidang topik yang memiliki kepentingan khusus dalam mencapai tujuan. Tiga aspek relevan yang disarankan di sini sebagai contoh: memfokuskan kembali pada keadilan ekonomi; menempatkan tanggung jawab ekologis kembali ke dalam inti analisis; dan fokus baru pada tanggung jawab pendidikan tinggi. Ketiga adalah **menguji kembali komitmen konseptual**. Ketika praktik dan kebijakan baru muncul dari fokus terhadap SDGs, kerangka teoritis yang ada mungkin bisa menjelaskan pekerjaan empiris. Misalnya saja, ketertarikan terhadap penjelasan yang ditawarkan oleh organisasi sebagaimana ditafsirkan melalui lensa yang diberikan oleh teori institusional dapat terus memberikan wawasan. Namun, akuntansi keberlanjutan sosial dan lingkungan juga siap untuk, dan sangat perlu, mengembangkan beberapa kerangka konseptual baru. Kebutuhan dan kemungkinan inovasi konseptual muncul dari sifat tantangan yang memunculkan SDGs. Ketika peneliti akuntansi menjadi lebih memperhatikan konteks di mana organisasi beroperasi, kerangka konseptual dari domain kebijakan dan geografi menjadi lebih relevan. SDGs mendorong pertimbangan ulang atas dasar kontrak sosial untuk menentukan tanggung jawab sosial perusahaan dan menunjukkan potensi pendekatan kapabilitas yang memberikan landasan filosofis politik untuk analisis.

BAB III

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN KEBERLANJUTAN

3.1. Definisi Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) sudah sangat banyak diketahui oleh masyarakat. CSR biasanya berhubungan erat dengan aktivitas membangun sesuatu seperti jembatan, gedung, dan juga berbagai kegiatan amal untuk masyarakat. Aktivitas seperti ini biasanya dikenal dengan istilah filantropi. Kemudian, pertanyaan muncul mengenai apakah CSR hanya seperti itu dimana perusahaan mengeluarkan uang yang dapat dikatakan sebagai sedekah perusahaan kepada masyarakat (filantropi). Ini menjadi perdebatan untuk memaknai bentuk formal dari CSR perusahaan. Gray et al. (2014) menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial mempunyai arti penting bagi setiap orang yang ingin mengetahui apa artinya menjadi orang baik atau menjalani kehidupan yang baik. Namun hal itu bukanlah satu-satunya alasan untuk menekankan hal ini di sini. CSR telah menduduki tempat penting dalam diskusi tentang arti pentingnya selama hampir 50 tahun. Walaupun pada saat itu masih sangat sedikit kesimpulan yang dicapai, diskusi ini memberikan banyak wawasan menarik dan krusial mengenai kehidupan organisasi di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21.

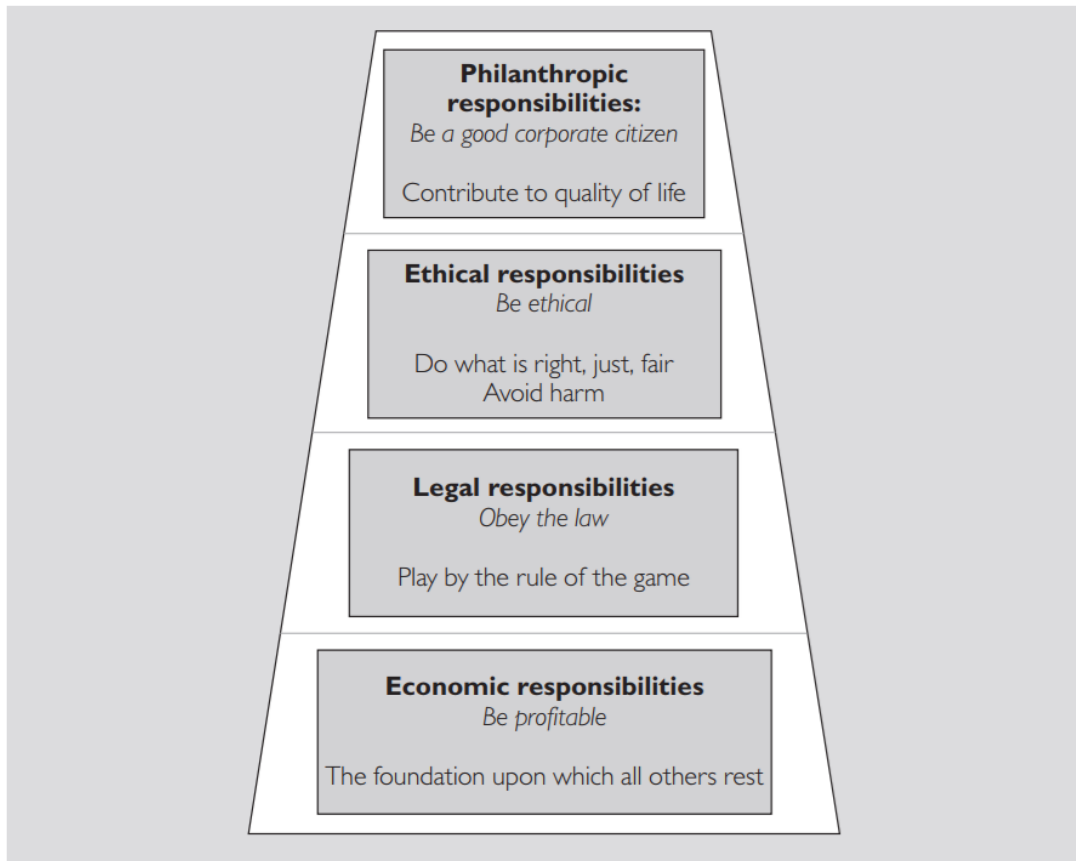
Laine et al. (2022) menjelaskan bahwa istilah CSR mirip dengan bisnis bertanggungjawab (*responsible business*) yang mana istilah tersebut fokus pada bisnis dan aktivitas terkait dengan tanggung jawab. Friedman (1970) mendefinisikan CSR sebagai berikut.

“A corporate executive . . . has a direct responsibility . . . to conduct the business . . . to make as much money as possible while conforming to the basic rules of society”

Definisi di atas memiliki makna bahwa manajemen perusahaan memiliki kewajiban langsung untuk menjalankan bisnis untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan mematuhi aturan dasar dari masyarakat. Definisi tersebut menyiratkan bahwa perusahaan diperbolehkan untuk mengejar profit sebesar mungkin tetapi perusahaan perlu untuk menyelaraskan operasinya dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat sekitar perusahaan. Pada sisi yang lain, definisi ini berpotensi untuk disalahartikan dan menempatkan perusahaan sebagai tempat memaksimalkan profit. Selain itu, aturan dasar dari masyarakat sangat dinamis sehingga keketatan dari aturan tersebut tidak dengan kuat mengikat perusahaan sehingga perusahaan dapat mengabaikan aktivitas CSR tersebut. Masyarakat mungkin senang dengan perusahaan hanya karena perusahaan memberikan uang kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya seperti memberikan bantuan pembangunan infrastruktur di suatu daerah. Padahal, filantropi dari perusahaan mungkin tidak sebanding dengan dampak negatif dari perusahaan baik terhadap lingkungan dan masyarakat sendiri. Bagi perusahaan, filantropi ini dianggap tidak mendatangkan profit bagi perusahaan karena ini akan menghasilkan biaya bagi perusahaan. Semakin besar biaya filantropi perusahaan, semakin kecil profit yang diperoleh perusahaan.

Freeman dan Liedtka (1991) menjabarkan alasan-alasan perusahaan tidak melakukan aktivitas CSR sebagai berikut.

1. Asal usulnya, ekonomi, mengabaikan budaya, agama, sejarah, dan lain-lain
2. Perusahaan adalah *profit maximizer*
3. Berdasar pada kapitalisme – sukai atau tinggalkan
4. Konservatif – mengambil status quo, memperbaiki konsekuensi yang tidak diinginkan
5. Mengambil manajer di luar dari bidang kompetensinya
6. Melihat bisnis dan masyarakat sebagai hal yang dapat dipisahkan – dihubungkan oleh tanggung jawab
7. Hak dan tanggung jawab terbatas dan tidak relevan bagi manajer praktis



Gambar 3.1. Piramida CSR dari Carrol (1991)

Carrol (1991) mengembangkan piramida dari CSR seperti yang digambarkan dalam Gambar 3.1. Bagian paling bawah dari piramida tersebut adalah tanggungjawab ekonomi. Ini menyiratkan bahwa ekonomi adalah komponen utama untuk melakukan CSR karena aktivitas CSR memerlukan uang dan perusahaan tetap harus menekankan pada profitabilitas perusahaan walaupun mengeluarkan uang untuk CSR. Bagian di atasnya adalah tanggungjawab legal yang menekankan pada kepatuhan terhadap hukum dan aturan. Perusahaan harus mematuhi aturan-aturan yang ada untuk mempertahankan kontrak sosial yang diperoleh. Jika perusahaan melanggar, kontrak sosial tersebut dapat dicabut oleh regulator sehingga perusahaan akan berhenti

beroperasi. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan harus mematuhi aturan-aturan terkait CSR untuk mempertahankan legitimasinya. Bagian selanjutnya adalah tanggungjawab etika. Bagian ini mendorong perusahaan untuk mengedepankan etika dengan melakukan sesuatu dengan benar, adil, dan menghindari kerusakan. Bagian paling atas adalah tanggungjawab filantropi. Bagian ini mendorong perusahaan untuk menjadi warga korporat yang baik. Ini dapat diwujudkan dengan berkontribusi pada kualitas hidup masyarakat. CSR perusahaan diharapkan membentuk masyarakat yang sejahtera ditengah-tengah operasi perusahaan yang mengharapkan profit semaksimal mungkin.

Gray et al. (2014) memberikan sedikit kritik terhadap piramida dari Carrol tersebut dengan menganggap gagal menjawab pertanyaan seperti: bisakah seseorang diizinkan bertindak secara ilegal dan tidak etis jika ingin mendapatkan keuntungan? mengapa keuntungan menjadi perhatian pertama dalam bisnis? apa gunanya bersikap etis? dan apakah kontribusi terhadap kualitas hidup dapat diperoleh selain melalui filantropi?. Gray et al. (2014) kemudian mengembangkan pandangan dunia dan pandangan CSR dengan menyajikan delapan pandangan sebagai berikut.

1. **Kapitalis murni** - adalah mereka yang melihat demokrasi ekonomi liberal sebagai perkiraan yang baik mengenai bagaimana dunia bekerja dan juga sebagai cara dunia seharusnya bekerja. Dalam perusahaan bebas, sistem kepemilikan pribadi, eksekutif perusahaan adalah karyawan dari pemilik bisnis. Dia mempunyai tanggung jawab langsung kepada majikannya. Tanggung jawab tersebut adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan mereka, yang umumnya menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dengan tetap memenuhi kebutuhan dasar, aturan-aturan masyarakat, baik yang diwujudkan dalam hukum, maupun yang diwujudkan dalam etika adat-istiadat.
2. Sudut pandang '**bijaksana**'. Pandangan seperti ini menganggap bahwa kesejahteraan dan stabilitas ekonomi jangka panjang hanya dapat dicapai

dengan menerima tanggung jawab sosial tertentu yang lebih luas. Pandangan ini biasanya akan mengakui bahwa sistem ekonomi saat ini memang menghasilkan eksese-eksese yang tidak dapat diterima sehingga sejumlah konten moral tambahan harus ditambahkan ke dalam hubungan organisasi-masyarakat.

3. **Pendukung kontrak sosial** cenderung menganggap bahwa perusahaan dan organisasi lain ada atas kemauan masyarakat dan oleh karena itu (sampai tingkat tertentu) terikat pada keinginan masyarakat. Lembaga sosial mana pun – termasuk dunia usaha – beroperasi dalam masyarakat melalui kontrak sosial, baik tersurat maupun tersirat, yang kelangsungan dan pertumbuhannya didasarkan pada: 1) Tercapainya tujuan-tujuan yang diinginkan secara sosial kepada masyarakat secara umum dan 2) Distribusi keuntungan ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok-kelompok yang menjadi sumber kekuasaannya. Kontrak sosial adalah gambaran yang kuat dan, tentu saja, merupakan landasan yang kuat dalam teori sosial dan demokrasi. Kontrak tersebut mengusung konsep saling ketergantungan dan tanggung jawab bersama serta mengedepankan prinsip akuntabilitas. Mereka yang menganut pandangan ini masih harus memutuskan seberapa jauh sistem organisasi ekonomi dan kelembagaan kita saat ini dari keadaan saling ketergantungan dan, terutama, seberapa tidak seimbangya distribusi kekuatan saat ini.
4. Istilah '**ahli ekologi sosial**' untuk menggambarkan mereka yang peduli terhadap lingkungan manusia (dalam arti luas), yang melihat permasalahan serius akan berkembang jika tidak ada tindakan yang segera dilakukan untuk mengatasi interaksi organisasi-lingkungan, dan yang menganggap bahwa organisasi-organisasi besar (dalam hal ini) telah berpengaruh dalam menciptakan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup sehingga dapat juga berpengaruh dalam membantu memberantas masalah-masalah tersebut.

5. Kaum '**sosialis**' – meskipun istilah ini sangat umum dan mencakup berbagai pandangan – cenderung percaya bahwa dominasi modal dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik saat ini adalah sebuah hal yang bertentangan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kembali yang signifikan terhadap kepemilikan dan struktur masyarakat. Dari sudut pandang politik, penting untuk ditekankan bahwa permasalahan yang terkait dengan teknologi maju tidak dapat dibingkai hanya dalam kategori ekonomi, yang hanya menyangkut kepemilikan dan kendali atas alat-alat produksi, namun menantang sifat politik dari sistem sosial dan budaya kita institusi-institusi tersebut, yaitu konsep tentang hakikat manusia yang menjadi asal mula institusi-institusi tersebut, dan praktik-praktik teknologi yang didasarkan pada institusi-institusi tersebut. Institusi yang mendukung hierarki sosial harus dihadapkan pada tuntutan pengakuan kesetaraan dan berbagi pengalaman kolektif bagi seluruh manusia.
6. **Feminisme** dan, khususnya, '**feminis radikal**'. Inti dari pandangan yang diungkapkan di sini adalah bahwa sistem ekonomi, sosial, politik dan bisnis kita – dan dengan demikian bahasa bisnis dan akuntansi – pada dasarnya adalah konstruksi 'maskulin' yang menekankan pada, misalnya, agresi, kesuksesan tradisional, prestasi, konflik, individualisme, kompetisi dan sebagainya. Oleh karena itu, dunia kita tidak memberikan suara yang tepat untuk, misalnya, kasih sayang, cinta, refleksi, kerja sama, dan nilai-nilai 'feminin' lainnya.
7. Para '**deep ecologists**', dalam banyak hal, memiliki pandangan yang lebih mirip dengan 'feminis radikal' dibandingkan rekan mereka yang lebih jelas, yaitu 'social ecologists'. Hal ini karena para ahli ekologi mendalam berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai hak yang lebih besar untuk hidup dibandingkan dengan bentuk kehidupan lainnya (dan memang, mereka mungkin telah kehilangan hak-hak mereka sebagai akibat dari perlakuan buruk yang dilakukan umat manusia terhadap sisa hidup mereka).

Pandangan seperti ini menjadi masukan bagi aktivis dan organisasi hak-hak hewan.

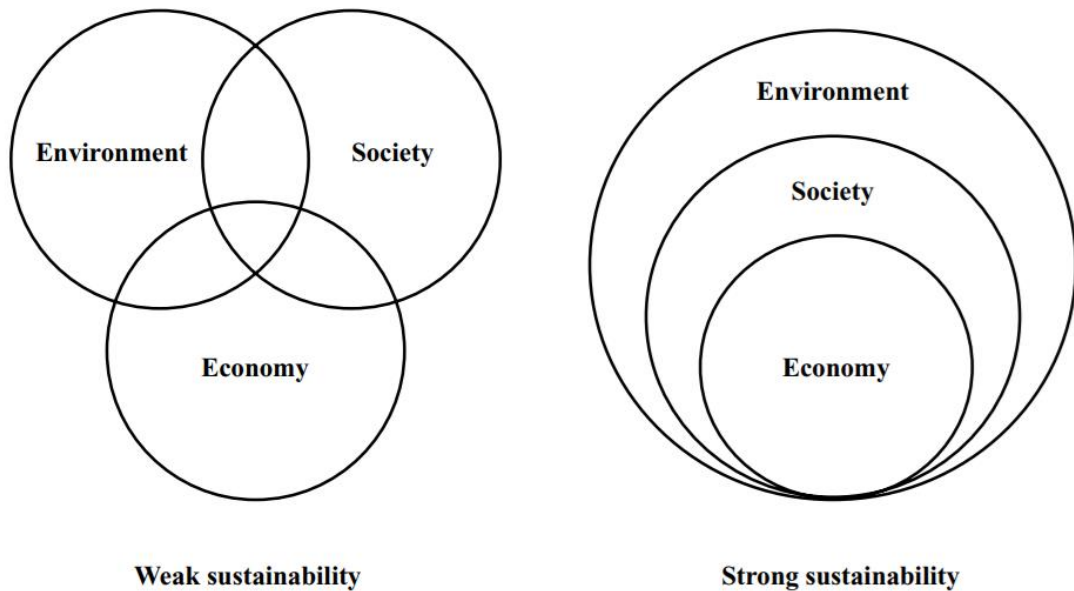
8. Yang terakhir, yaitu pandangan yang lebih sesuai dengan **postmodernisme**. Pandangan postmodernis biasanya juga menolak sebagian besar struktur dan perlengkapan kehidupan modern (kebanyakan) barat. Pemikiran postmodern menawarkan kritik mendasar terhadap modernitas dan, dengan melakukan hal tersebut, secara signifikan menambah tantangan yang harus diatasi oleh akuntansi sosial.

3.2. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Istilah CSR kadang dikaitkan dengan istilah keberlanjutan. Meskipun memiliki kemiripan, namun dua istilah tersebut memiliki perbedaan pandangan. Laine et al. (2022) memandang keberlanjutan sebagai sebuah sistem yang memiliki topik terpusat pada organisasi. Gray et al. (2014) mengartikan keberlanjutan (atau, sering disebut, pembangunan berkelanjutan) sebagai sistem pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Gagasan penting di balik keberlanjutan adalah bahwa perilaku yang ada saat ini tidak berkelanjutan dan karenanya mengancam cara hidup saat ini dan masa depan. Keberlanjutan adalah penting setidaknya karena dua alasan utama: pertama, hal ini menegaskan agenda politik dan bisnis dunia bahwa cara-cara melakukan sesuatu saat ini memang memiliki 'eksternalitas'; dan kedua, ini merupakan prinsip yang hampir diterima secara universal.

Keberlanjutan pada dasarnya berdasarkan pada *triple bottom line* (TBL) yang meliputi pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial. Namun, Laine et al. (2022) menganggap bahwa TBL memiliki kelemahan khususnya pada pemahaman berbeda pada bagaimana setiap pilar terhubung satu sama lain. Pemahaman yang berbeda

menyebabkan perbedaan pandangan mengenai bagaimana keberlanjutan dapat dicapai. Laine et al. (2022) menggambarkan keberlanjutan lemah dan keberlanjutan kuat seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.2. Perbedaan utama antara dua pemahaman keberlanjutan yang berbeda ini berkaitan dengan *trade-off*, yaitu sejauh mana satu atau lebih dimensi keberlanjutan dapat saling dipertukarkan. Misalnya, perspektif yang didasari oleh lemahnya konseptualisasi keberlanjutan, diagram keterkaitan di sebelah kiri, memungkinkan terjadinya *trade-off* seperti itu. Ketika beroperasi dengan konseptualisasi keberlanjutan yang lemah, fokusnya adalah pada pencapaian “win-win”. Win-win adalah tindakan atau peluang yang menguntungkan dua dimensi. Namun hal ini seringkali terjadi tanpa mempertimbangkan dimensi ketiga (membutuhkan win-win-win).



Gambar 3.2. Keberlanjutan lemah (*weak*) dan kuat (*strong*)

Perspektif yang didasari oleh keberlanjutan yang kuat, diagram tersarang di sebelah kanan, melihat hubungan antar dimensi secara berbeda sehingga pengoperasian berdasarkan konseptualisasi semacam itu akan menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Di sini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa pandangan kuat melihat perekonomian bergantung pada masyarakat dan masyarakat bergantung pada lingkungan. Prinsip ini menyatakan bahwa perekonomian yang sehat dan stabil bergantung pada masyarakat yang berfungsi dengan baik, dan masyarakat tersebut bergantung pada lingkungan yang sehat dan berfungsi. Di sini dimensi-dimensinya dipandang saling bergantung dan tidak ada ruang untuk *trade-off*. Lebih jauh lagi, lingkungan dipandang sebagai sistem menyeluruh yang menjadi sandaran semua dimensi lainnya. Jadi, meskipun model keberlanjutan yang kuat masih melibatkan ketiga dimensi tersebut, konsepnya sangat berbeda.

Singkatnya, perspektif keberlanjutan yang lemah, yang masih umum terjadi di banyak organisasi, memandang masing-masing dimensi berada dalam satu kesatuan, bukan saling bergantung, sebagai bagian dari suatu sistem. Ini adalah batasan utama TBL. Perspektif sistem dan model keberlanjutan yang kuat juga relevan ketika melihat bagaimana pertimbangan keberlanjutan mempengaruhi sistem perekonomian.

3.3. Akuntansi Keberlanjutan (*Sustainability Accounting*)

Kemunculan akuntansi keberlanjutan biasanya diidentifikasi terjadi pada tahun 1970an. Hal ini umumnya dikaitkan dengan munculnya pelaporan perusahaan mengenai lingkungan dan masyarakat. Praktik ini merupakan praktik penting dalam domain akuntansi dan akuntabilitas keberlanjutan, dan banyak perhatian telah diberikan pada praktik pelaporan. Secara khusus, motivasi pelaporan keberlanjutan perusahaan dan upaya untuk memajukan dan meningkatkan praktik pelaporan telah diteliti dengan baik dan kini cukup dipahami. Meskipun pada awalnya berkembang sebagai disiplin ilmu yang terpisah, yaitu akuntansi lingkungan dan akuntansi sosial

serta pelaporan terkait, dan semakin populer selama beberapa tahun, sejak tahun 1990an praktik pelaporan keberlanjutan telah menjadi hal yang lumrah dan dilembagakan setidaknya dalam perusahaan besar. Kerangka pelaporan keberlanjutan, misalnya Inisiatif Pelaporan Global (GRI) dan, mungkin pada tingkat lebih rendah, Pelaporan Terintegrasi (<IR>), telah muncul dalam bidang ini dan merupakan kerangka kerja utama dalam bidang akuntansi keberlanjutan.

Contoh lain dimana praktik akuntansi keberlanjutan paling umum atau terlihat adalah yang berkaitan dengan isu perubahan iklim. Berbagai alat dan praktik akuntansi dan akuntabilitas telah bermunculan sehubungan dengan emisi iklim dan karbon. Jejak karbon, sebuah alat untuk membantu suatu entitas memahami, mengukur, dan mencatat emisi karbonnya, adalah salah satu contohnya. Ini hanyalah salah satu dari banyak bidang yang menyoroti sifat “akuntansi baru”.

Pengaruh konteks keberlanjutan global terhadap akuntansi juga dapat dilihat ketika mempertimbangkan perubahan sifat profesi akuntansi dan berbagai badan akuntansi profesional yang mendukungnya. Banyak praktik akuntansi, terutama perusahaan Big4, yang aktif dalam mengembangkan dan menyediakan solusi akuntansi keberlanjutan yang inovatif kepada klien mereka. Hal ini sebagian merupakan respons terhadap pengakuan akan pentingnya keberlanjutan bagi semakin banyak klien mereka, dengan adanya tuntutan akan alat untuk menanamkan pemahaman tentang dampak dan ketergantungan sosial dan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional klien. Penyediaan layanan ini juga dapat menjadi pendorong proaktif, dimana perusahaan menyadari adanya kebutuhan etis untuk mendukung transisi menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan.

BAB IV

AKUNTABILITAS DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

4.1. Definisi Akuntabilitas

Pada Bab III telah disinggung mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut dengan istilah CSR. Inti dari CSR adalah bagaimana perusahaan meminimalkan dampak negatif perusahaan terhadap sosial dan juga lingkungan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui apa pertanggungjawaban perusahaan dan apakah perusahaan telah memenuhi pertanggungjawabannya tersebut. Pertanyaan tersebut adalah suatu pertanyaan yang sangat kompleks namun jawaban dari pertanyaan tersebut adalah suatu kunci penting. Pertanyaan ini dapat diselesaikan dengan cara memberikan informasi mengenai aktivitas perusahaan. Mudah-mudahan berbicara, aktivitas memberikan sebuah akun (Laine et al. 2022). Definisi akuntabilitas adalah seperti ini yaitu memberikan informasi mengenai aktivitas perusahaan.

Gray et al. (2014) mendefinisikan akuntabilitas kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan atas perbuatan-perbuatan yang menjadi tanggung jawabnya. Laine et al. (2022) mengartikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan yang dianggap menjadi tanggung jawab seseorang. Gray et al. (2014) lebih lanjut menjelaskan akuntabilitas memiliki dua komponen penting: akuntabilitas muncul sebagai akibat dari hubungan antara dua pihak atau lebih (baik individu, asosiasi atau organisasi) dan sifatnya ditentukan oleh konteks sosial dan moral di mana hubungan tersebut diwujudkan. Setiap individu akan mempunyai banyak sekali hubungan misalnya dengan teman, keluarga, rekan kerja, rekan kerja, pedagang, komunitas lokal, sahabat pena, kenalan biasa, serta dengan negara, perusahaan, LSM, dan organisasi lainnya. Masing-masing hubungan ini memiliki karakter yang berbeda – ada yang bersifat emosional, ada yang bersifat ekonomi, ada yang santai, ada yang intens, dan seterusnya. Apa yang dianggap

sebagai perilaku wajar dalam hubungan dan dengan demikian mengatur perilaku para pihak adalah konteks di mana perilaku tersebut terjadi. Budaya yang berbeda, generasi yang berbeda, memiliki standar penerimaan yang berbeda pula. Artinya, setiap hubungan mempunyai dimensi moral yang ditentukan oleh sifat hubungan, tindakan yang diharapkan dan/atau diperlukan dalam hubungan tersebut, dan konteks komunitas. Salah satu aspek dari dimensi moral ini adalah keharusan untuk memberikan ‘pertanggungjawaban’ – untuk menjelaskan diri sendiri, untuk mengartikulasikan niat dan aspirasi seseorang, untuk memberikan penjelasan rinci tentang tindakan seseorang. Ini adalah akuntabilitas – dan kami selalu melaksanakannya dengan berbagai tingkat keberhasilan, formalitas, dan transparansi.

Laine et al. (2022) menghubungkan akuntabilitas dengan lisensi sosial untuk beroperasi dan legitimasi. Lisensi sosial untuk beroperasi pada beberapa kesempatan dianggap sama dengan lisensi legal atau regulasi. Padahal, dua istilah tersebut adalah berbeda. Lisensi legal atau regulasi untuk beroperasi relatif mudah dan mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Artinya, suatu organisasi beroperasi berdasarkan peraturan yang ada dalam suatu konteks. Misalnya, suatu organisasi mungkin mengikuti peraturan yang diwajibkan atau telah diberikan izin khusus untuk beroperasi. Lisensi sosial untuk beroperasi mungkin tidak begitu mudah, namun sama pentingnya. Lisensi sosial untuk beroperasi pada hakikatnya adalah persetujuan yang diberikan oleh berbagai kelompok sosial atau masyarakat pada umumnya. Lisensi beroperasi ini tidak dituangkan dalam konteks peraturan hukum, melainkan dalam konteks normatif dan moral. Jelasnya, tidak ada izin sosial atau kontrak sosial dalam bentuk nyata apa pun, melainkan tidak berwujud, berkaitan dengan hubungan yang dimiliki suatu organisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Jika suatu organisasi karena alasan tertentu dianggap tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat, maka organisasi tersebut berisiko kehilangan izin sosial untuk beroperasi. Ini jelas merupakan penyederhanaan yang kasar, karena situasinya tidak jelas di semua kasus. Dalam praktiknya, hilangnya lisensi sosial untuk beroperasi dapat terwujud melalui publisitas

negatif, berkurangnya minat pelanggan, boikot konsumen yang aktif, reaksi negatif dari pemasok atau pelanggan korporat, protes sosial yang terlihat di luar fasilitas organisasi atau di media sosial, dan sebagainya.

Semua gagasan ini (kontrak sosial, izin sosial untuk beroperasi, dan legitimasi organisasi) berkaitan erat dengan tanggung jawab dan akuntabilitas. Hal ini menyiratkan bahwa suatu organisasi perlu memenuhi beberapa persyaratan dan tanggung jawab dasar untuk mempertahankan izin sosialnya untuk beroperasi dalam masyarakat tertentu. Untuk menunjukkan hal ini, organisasi melaksanakan akuntabilitas mereka dengan memberikan penjelasan atas tindakan mereka. Atau setidaknya itulah yang diharapkan dari mereka, karena dalam banyak kasus tidak ada kewajiban hukum bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Pernyataan-pernyataan ini juga penting dalam cara orang lain memandang suatu organisasi dan tindakannya.

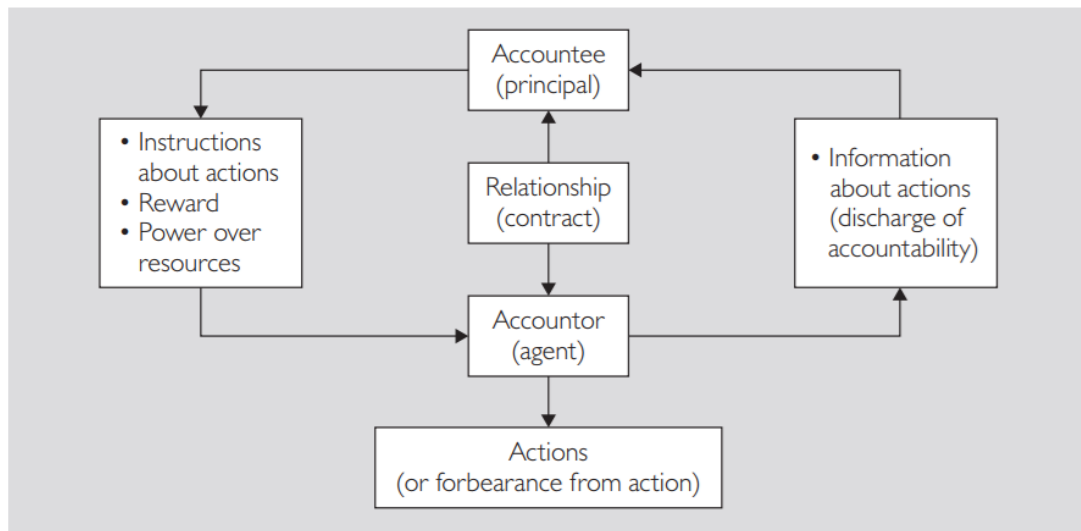
Namun tantangan utamanya adalah menentukan jenis laporan dan informasi apa yang dapat dan harus diberikan oleh suatu organisasi. Jenis akun apa yang diperlukan untuk melaksanakan akuntabilitas? Karena kontrak sosial dan legitimasi lebih berhubungan dengan bagaimana kelompok sosial lain memandang organisasi dibandingkan dengan bagaimana organisasi tersebut beroperasi, sering kali disarankan bahwa organisasi dapat berupaya meningkatkan reputasi mereka dan mempertahankan legitimasi mereka di masyarakat melalui publikasi informasi positif, seperti laporan keberlanjutan yang menyoroti pencapaian dan niat baik mereka. Kelompok sosial lain jarang memiliki akses langsung terhadap aktivitas organisasi, yang berarti bahwa mereka sebagian besar bergantung pada informasi yang diberikan organisasi tersebut.

4.2. Sebuah Model Akuntabilitas

Untuk memahami akuntabilitas, langkah awal dapat dimulai dengan mengidentifikasi bahwa akuntabilitas melibatkan dua tanggung jawab atau tugas yang luas: tanggung jawab untuk melakukan tindakan tertentu, atau tidak melakukan tindakan, dan

tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Kasus akuntabilitas formal yang paling sederhana dan familiar adalah akuntabilitas pemegang saham dan perusahaan. Para direktur suatu perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sumber daya, baik keuangan maupun non-keuangan, yang dipercayakan kepada mereka oleh pemegang saham dan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut. Oleh karena itu, kita dapat melihat laporan tahunan dan laporan keuangan sebagai mekanisme untuk melaksanakan akuntabilitas ini.

Gray et al. (2014) mengembangkan model akuntabilitas sederhana untuk memahami makna dari akuntabilitas seperti tersaji pada Gambar 4.1. Versi dasar model ini menghipotesiskan hubungan dua arah yang sederhana antara seorang *accountee* (yang mungkin kita sebut sebagai 'prinsipal' dan dalam akuntansi keuangan konvensional adalah pemegang saham) dan *accountor* (yang mungkin kita sebut agen dan dalam akuntansi keuangan konvensional akan menjadi direktur sebuah perusahaan). Istilah-istilah yang mengalir di antara para pihak dan tindakan serta akuntabilitas yang diperlukan akan menjadi fungsi dari hubungan tersebut, yang dapat dianggap sebagai sebuah 'kontrak' antara para pihak. Hal ini, pada gilirannya, akan mencerminkan konteks sosial dari hubungan tersebut (misalnya pentingnya masyarakat menempatkan aliran modal ke perusahaan sebagai imbalan atas hak istimewa berupa tanggung jawab terbatas dan hak atas informasi).



Gambar 4.1. Model sederhana dari akuntabilitas (Gray et al. 2014)

Model ini jauh lebih fleksibel daripada yang terlihat. Misalnya, *accountee* dan *accountor* dapat berupa individu, organisasi, atau kelompok. Sepasang *accountor* dan *accountee* tertentu mungkin memiliki beberapa hubungan yang berbeda dan dengan demikian dapat menjadi *accountor* di satu akun dan *accountee* di akun lain sehingga seorang karyawan mungkin bertanggung jawab kepada manajemen suatu organisasi atas kinerja kerjanya sementara manajemen mungkin juga bertanggung jawab kepada karyawan sejauh mana perusahaan mematuhi undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja. Karyawan juga bisa menjadi pemegang saham sehingga dapat meminta pertanggungjawaban manajemen, sementara karyawan dan manajemen, sebagai anggota masyarakat, mungkin ingin meminta pertanggungjawaban perusahaan atas catatan pencemarannya. Inti dari model ini adalah hubungan antara para pihak dan peran masyarakat – atau elemen-elemen masyarakat – dalam hubungan tersebut. Melalui hubungan inilah konsep tanggung jawab terbentuk dan hak terkait atas informasi (akuntabilitas) ditentukan. Jadi isu krusialnya, ketika kita beralih ke hubungan yang lebih formal dan tidak terlalu dekat, adalah bagaimana kita harus

menetapkan kapan suatu hubungan adalah sebuah ‘kontrak’ yang ada dan apakah kita perlu mengenali jenis-jenis kontrak yang berbeda.

4.3. Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Meskipun kontrak sosial dan gagasan legitimasi dalam masyarakat telah memberikan wawasan menarik bagi pemahaman kita tentang hubungan organisasi dan masyarakat, perlu diakui bahwa berbicara tentang masyarakat kesatuan dengan pandangan dan nilai-nilai yang sama adalah hal yang terlalu sederhana. Masyarakat terdiri dari berbagai jenis individu, kelompok, dan organisasi, masing-masing dengan nilai, prioritas, dan asumsinya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap masyarakat dan aktor-aktor sosial. Untuk lebih memahami pentingnya akuntabilitas dan bagaimana hubungan akuntabilitas tersebut terbentuk, kita perlu mencermati konsep pemangku kepentingan.

Ada banyak definisi mengenai siapa dan apa yang dianggap sebagai pemangku kepentingan, namun menurut definisi klasik Freeman (1984), pemangku kepentingan mencakup kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh pencapaian tujuan organisasi. Pada sebuah perusahaan, daftar dari pemangku kepentingan tidak terbatas. Ini menjadi suatu pekerjaan yang menantang bagi perusahaan untuk memahami pemangku kepentingannya. Setiap kelompok pemangku kepentingan memiliki harapan dan permintaan terhadap perusahaan yang harus dipenuhi. Pada sisi yang lain, kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan terbatas. Perusahaan mungkin akan mementingkan kelompok pemangku kepentingan tertentu untuk dipenuhi permintaannya. Karenanya, perusahaan harus tahu dan mampu memetakan pemangku kepentingannya.

Penting bagi organisasi untuk melakukan pemetaan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingannya. Hal ini dapat dilakukan sehubungan dengan organisasi secara umum, atau alternatifnya pada tingkat yang lebih

rinci mengenai lokasi produksi baru, proyek atau produk tertentu. Selain mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan yang dimiliki suatu organisasi, pemetaan pemangku kepentingan juga harus mencakup melihat karakteristik pemangku kepentingan tersebut dan hubungan yang mereka miliki dengan organisasi (Rinaldi et al., 2014). Hal ini membantu organisasi untuk memahami keseluruhan situasi: siapa pemangku kepentingan utama, kelompok mana yang paling berpengaruh terhadap organisasi, kelompok mana yang paling terkena dampak kegiatan organisasi, kelompok mana yang paling bersuara saat menyampaikan pendapat, dan sebagainya. Memiliki pemahaman seperti itu penting ketika mempertimbangkan hubungan akuntabilitas yang dimiliki suatu organisasi.

Selain melakukan pemetaan terhadap pemangku kepentingan, Laine et al. (2022) memberikan pandangan bahwa pemetaan pemangku kepentingan harus melibatkan arti penting dari pemangku kepentingan. Jelas terlihat bahwa kelompok pemangku kepentingan tidak setara – terutama di mata organisasi yang cenderung menganggap beberapa pemangku kepentingan lebih penting. Mitchell et al. (1997) menyebut hal ini sebagai arti-penting pemangku kepentingan (*stakeholder salience*), yang mengidentifikasi bahwa, dari sudut pandang organisasi, beberapa pemangku kepentingan mempunyai arti-penting yang lebih besar dibandingkan yang lain. Mereka menyarankan organisasi, atau lebih tepatnya para manajer dalam organisasi, menggunakan tiga konsep kekuasaan, legitimasi, dan urgensi untuk menentukan kelompok pemangku kepentingan mana yang paling penting. Pemangku kepentingan berbeda-beda dalam hal kekuasaan yang mereka miliki terhadap suatu organisasi, dan keseimbangan ini juga berbeda dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Posisi beberapa kelompok, misalnya kreditur yang memberikan modal jangka pendek kepada organisasi, bisa jadi organisasi tidak punya pilihan selain menjawab tuntutan tersebut. Beberapa kelompok lain mungkin menyampaikan kritik dan tuntutan secara vokal, namun tanpa memiliki pengaruh atau kekuasaan apa pun terhadap organisasi. Oleh karena itu, mereka mungkin diabaikan oleh organisasi. Atau sebagai alternatif,

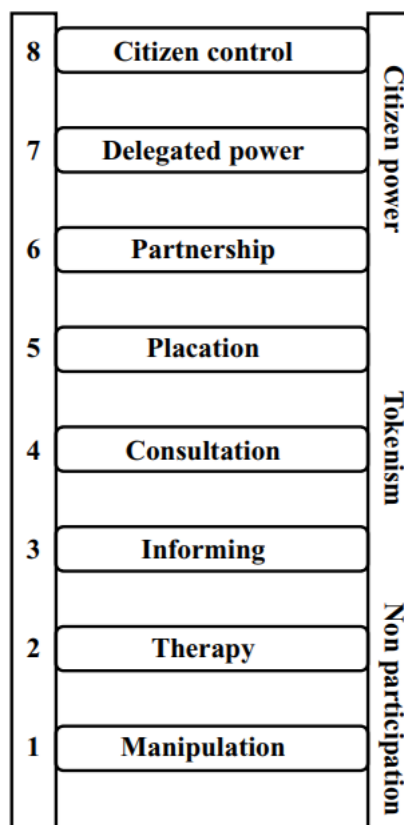
permintaan tersebut mungkin dianggap kurang mendesak, dan oleh karena itu organisasi mungkin memilih untuk tidak memberikan jawaban pada poin berikutnya. Dalam model Mitchell et al. (1997), para pemangku kepentingan yang dianggap memiliki ketiga atribut, yaitu kekuasaan, legitimasi, dan urgensi, disebut pemangku kepentingan definitif.

4.4. Keterlibatan dan Manajemen Pemangku Kepentingan

Setelah pemangku kepentingan diidentifikasi, kita perlu mempertimbangkan bagaimana manajer organisasi kemudian mengetahui apa yang dipikirkan dan diharapkan oleh berbagai pemangku kepentingan terhadap organisasi atau beberapa aktivitas spesifiknya. Untuk tujuan ini, keterlibatan pemangku kepentingan dapat dimanfaatkan. Secara luas, keterlibatan pemangku kepentingan mengacu pada proses di mana organisasi melibatkan pemangku kepentingannya untuk mempelajari harapan, asumsi, dan sudut pandang mereka. Tidak ada bentuk spesifik yang harus diambil dalam proses pelibatan pemangku kepentingan. Beberapa organisasi mencoba melakukan hal ini secara online, beberapa mengadakan acara individu dan melihat siapa yang hadir, sementara yang lain lebih memilih mengadakan pertemuan rutin dengan pemangku kepentingan tertentu untuk menjaga komunikasi yang baik dan meningkatkan hubungan.

Arnstein (1969) menggambarkan hal ini melalui apa yang dikenal sebagai tangga partisipasi Arnstein seperti tersaji pada Gambar 4.2. Arnstein membedakan delapan derajat atau jenis partisipasi yang berbeda. Di ujung bawah tangga terdapat derajat yang disebut dengan non-partisipasi (*non-participation*). Posisi-posisi non-partisipasi dalam jenjang ini, dalam praktiknya, adalah upaya untuk memenangkan dukungan publik terhadap sesuatu. Di tengah-tengahnya terdapat derajat-derajat seperti *informing*, *consultation*, dan *placation*. Arnstein menyebut hal ini sebagai *tokenism* karena tampaknya menawarkan kesempatan kepada publik untuk

memberikan pandangan dan pengaruhnya, namun dalam praktiknya tidak memberikan kekuatan nyata kepada para partisipannya. Mekanisme tingkat teratas seperti *partnership* dan *delegation* mengacu pada situasi di mana masyarakat yang berpartisipasi benar-benar memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi hasil. Oleh karena itu, posisi tertinggi Arnstein di tangga tersebut mewakili kekuatan masyarakat.



Gambar 4.2. Tangga Arnstein

Ide serupa juga terlihat dalam banyak proses pelibatan pemangku kepentingan. Seringkali proses pelibatan pemangku kepentingan masih berada pada tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini berarti bahwa pemangku kepentingan dibiarkan dalam peran pasif. Dalam banyak hal, mereka hanya diberi informasi tentang aktivitas

organisasi. Dari sudut pandang organisasi, tujuan keterlibatan tersebut juga dapat dianggap sebagai manajemen pemangku kepentingan. Manajemen pemangku kepentingan mengacu pada sebuah organisasi yang berusaha mempengaruhi para pemangku kepentingannya dan mempengaruhi pandangan mereka sehingga mereka akan lebih berpihak pada organisasi. Namun terkadang, proses pelibatan pemangku kepentingan ternyata melibatkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi, sehingga terjadilah dialog pemangku kepentingan yang sebenarnya. Dalam situasi seperti ini, prosesnya dapat berupa interaksi jangka panjang, yang mana organisasi dan pemangku kepentingan dapat mempelajari tujuan, keraguan dan harapan masing-masing pihak, dan mungkin menghasilkan solusi bersama yang memberikan hasil positif bagi semua pihak yang terlibat.

Poin pentingnya di sini adalah bahwa meskipun proses pelibatan pemangku kepentingan, dibandingkan dengan pengelolaan pemangku kepentingan, mungkin tampak memberatkan bagi sebuah organisasi, namun terdapat banyak manfaat yang dapat diperoleh melalui proses tersebut. Proses-proses tersebut membantu organisasi mempelajari dan mengenai pemangku kepentingannya, memberikan peluang untuk meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan, membantu dalam mengidentifikasi tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat, dan pada akhirnya membantu dalam melaksanakan akuntabilitas organisasi terhadap para pemangku kepentingannya.

REFERENSI

- Arnstein, S. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Planning Association*, 35 (4), 216–224.
- Bebbington, J. dan Unerman, J. (2018). Achieving the United Nations Sustainable Development Goals: An enabling role for accounting research. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 31 (1), 2–24
- Carnegie G., Parker, L. dan Tsahuridu, E. (2021). It's 2020: What is Accounting Today?. *Australian Accounting Review*, 96 (31), 65-73.
- Carroll, A. B. (1991) The pyramid of corporate social responsibility: Towards the moral management of organizational stakeholders, *Business Horizons*, July/August: 42.
- Deegan, C. (2019), *Financial Accounting*, 9th edition, McGrawHill Education, North Sydney.
- Elkington, J. (1997). *Canibal with Forks: The Tripple Bottom Line of 21st Century Business*. Capston, Oxford.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Freeman, E. R. dan Liedtka, J. (1991) Corporate social responsibility: a critical approach, *Business Horizons* (July–August): 92–8.
- Gray, R., Owen, D. dan Adams, C. 1996, *Accounting & Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*, Prentice Hall, London.
- Gray, R., Adams, C. dan Owen, D. (2014). *Accountability, Social Responsibility and Sustainability: Accounting for Society and the Environment*. Pearson.
- Laine M., Tregidga, H, dan Unerman, J. (2022). *Sustainability Accounting and Accountability*. Routledge, Oxon.
- Mitchell, R. Agle, B. dan Wood, D. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review*, 22(4), 853–886.

Rinaldi, L., Unerman, J. and Tilt, C. (2014). The Role of Stakeholder Engagement and Dialogue within the Sustainability Accounting and Reporting Process. In Bebbington, J., Unerman, J. and O'Dwyer, B. (eds). *Sustainability Accounting and Accountability* (2nd edn). Routledge.